

ABSTRAK

Sebastianus Iyai. 21.75.7172. **Etika Diskursus Jurgen Habermas dan Relevansinya Bagi Penyelesaian Konflik Vertikal di Papua**. Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Filsafat, Intitut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2025.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk (1) menelisik dan menjelaskan kontribusi etika diskursus Jurgen Habermas bagi pengelolaan konflik vertikal di Papua, (2) menjelaskan konsep Jurgen Habermas tentang etika diskursus, dan (3) mendeskripsikan realitas konflik vertikal di Papua.

Metode yang digunakan dalam pengerjaan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam hal ini penulis membuat kajian pustaka terhadap literatur-literatur yang mengulas mengenai konflik vertikal di Papua dan etika diskursus Jurgen Habermas.

Papua dilanda konflik vertikal sejak tahun 1963. Konflik vertikal ini terjadi karena adanya marginalisasi, perbedaan kepentingan dan pendapat antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua. Menurut pemerintah pusat Papua adalah bagian utuh dari Indonesia, sementara menurut masyarakat Papua, Papua sendiri berada terpisah dari Indonesia. Masyarakat Papua menilai terdapat kegagalan dalam proses integrasi Papua ke dalam Indonesia karena proses integrasi tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang benar dan berjalan di bawah tekanan dari kekuasaan. Berlandaskan pada klaim tersebut, akhirnya konflik semakin subur dan meluas hingga saat ini. Mengakhiri konflik vertikal tersebut pemerintah telah berupaya menawarkan dan menerapkan berbagai pendekatan dan kebijakan. Namun, nampaknya setiap pendekatan dan kebijakan itu belum menuntaskan akar persoalan di Papua.

Bertolak dari persoalan di atas, penulis menawarkan etika diskursus Jurgen Habermas sebagai salah satu alternatif untuk membendung konflik vertikal di Papua. Dalam etika diskursus sangat menekankan komunikasi yang rasional dan argumentatif. Setiap perbedaan dan kepentingan harus dikomunikasikan secara terbuka. Komunikasi ini berlangsung tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Komunikasi yang terjadi dibawa tekanan, intimidasi, manipulatif dan penuh rekayasa dianggap tidak sah. Tujuan dari komunikasi adalah mencapai kesepakatan bersama. Dasar dari konsensus adalah argumen yang rasional dan disepakati bersama. Prinsip etika diskursus mengatakan bahwa norma dianggap sah apabila disepakati bersama. Bertolak dari prinsip itu, berbagai pandangan dan kepentingan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat harus dikomunikasikan secara bebas dan terbuka. Tujuannya adalah kedua pihak yang bertikai dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam komunikasi itu setiap partisipan harus memperhatikan klaim-klaim kesahihan seperti kejelasan, kebenaran, ketepatan dan kejujuran. Hal ini bertujuan agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Dengan demikian, komunikasi dapat menghasilkan konsensus rasional dan argumentatif.

Kata Kunci: *Jurgen Habermas, etika diskursus, konflik vertikal di Papua.*

ABSTRACT

Sebastianus: Yes. 21.75.7172. **The Ethics of Jurgen Habermas's Discourse and Its Relevance for Vertical Conflict Resolution in Papua.** Thesis. Bachelor's Program, Philosophy Study Program, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology, 2025.

The purpose of this thesis is to (1) examine and explain the contribution of Jurgen Habermas' discourse ethics to the management of vertical conflicts in Papua, (2) explain Jurgen Habermas' concept of discourse ethics, and (3) describe the reality of vertical conflict in Papua.

The method used in working on this thesis is a qualitative descriptive method. In this case, the author makes a literature review of literature that reviews vertical conflicts in Papua and the ethics of Jurgen Habermas' discourse.

Papua has been hit by vertical conflict since 1963. This vertical conflict occurs due to marginalization, differences in interests and opinions between the central government and the Papuan people. According to the central government, Papua is an integral part of Indonesia, while according to the Papuan people, Papua itself is separate from Indonesia. The Papuan people consider that there are irregularities in the process of integrating Papua into Indonesia because the integration process is not in accordance with the correct procedures and runs under pressure from power. Based on these claims, finally the conflict is increasingly fertile and widespread to this day. To end these vertical conflicts, the government has tried to offer and implement various approaches and policies. However, it seems that each of these approaches and policies has not solved the root of the problem in Papua.

Departing from the above problem, the author offers the ethics of Jurgen Habermas' discourse as one of the alternatives to stem vertical conflicts in Papua. In discourse ethics, it emphasizes rational and argumentative communication. Any differences and interests should be communicated openly. This communication continued without any pressure and coercion from any party. The communication that occurs is under pressure, intimidation, manipulation and manipulation is considered illegitimate. The purpose of communication is to reach a mutual agreement. The basis of consensus is rational and mutually agreed upon arguments. The ethical principle of discourse says that norms are considered valid if they are mutually agreed. Contrary to this principle, various views and interests between the Papuan people and the central government must be communicated freely and openly. The goal is that the two warring parties can come to a mutual agreement. In the communication, every pastor must pay attention to legitimate claims such as clarity, truthfulness, accuracy and honesty. This is so that communication can continue well. Thus, communication can generate rational and argumentative consensus.

Keywords: *Jurgen Habermas, discourse ethics, vertical conflict in Papua.*

